

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Community Empowerment Based on Village Owned Enterprises (Bumdesa) in Kendalbulur Village, Boyolangu District, Tulungagung Regency

Wahyu Yuniarko^{1*}, Teguh Pramono²

E-mail: yuniarko84@gmail.com¹, tghpram@unik-kediri.ac.id²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri

*corresponding author

Dikirimkan: 14-01-2023; Diterima: 12-04-2023; Diterbitkan: 16-04-2023

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.7890>

Abstract

This research was conducted with the aim of 1) describing and analyzing community empowerment through BUMDesa Larasati 2) describing and analyzing what are the factors that hinder and support community empowerment through BUMDesa Larasati. This research is a qualitative research, with a descriptive approach. The informants in this study are the Director, Manager of the Online Payment Business Unit, Treasurer, BumDesa Supervisory Member, MSME business owner and Warung business owner. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques include data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that Community Empowerment through BUMDesa Larasati runs optimally in empowering the community. The empowerment stage carried out consists of an awareness stage where the community that is the subject of empowerment is given an awareness that every human being has potential that can continue to be developed. The next stage is the capacity stage, this process can be achieved if the community already has the ability to receive power; and finally the stage of empowerment where the community is empowered, authority, or opportunity to develop to achieve independence. Supporting factors in community empowerment are the potential to be developed and a culture of mutual cooperation and community togetherness that is quite close. The inhibiting factor is that community involvement in the BUMDesa Larasati unit is less than optimal due to inadequate human resources.

Keywords: Community Empowerment, Village-Owned Enterprises, MSMEs

Abstrak

Riset ini dilakukan dengan tujuan 1) mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa Larasati 2) mendeskripsikan dan menganalisis apa saja factor yang menghambat dan mendukung pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa Larasati. Riset ini merupakan riset kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam riset ini adalah Direktur, Manajer Unit Usaha Pembayaran Online, Bendahara, Anggota Pengawas BUMDesa, Pemilik usaha UMKM dan Pemilik usaha Warung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik Analisa data meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa Larasati berjalan optimal dalam memberdayakan masyarakat. Adapun tahapan pemberdayaan yang dilakukan terdiri dari tahap penyadaran dimana masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan diberikan penyadaran bahwasanya setiap manusia memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan. Tahap selanjutnya tahap pengkapasitasan, proses ini dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai

kemampuan menerima daya; dan terakhir tahap pendayaan dimana masyarakat diberdayakan, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat yaitu adanya potensi untuk dikembangkan dan budaya gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang cukup erat. Faktor penghambat yaitu keterlibatan masyarakat dalam unit BUMDesa Larasati kurang optimal karena sumber daya manusia yang kurang memadai.

Keywords: *Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, UMKM.*

1. Pendahuluan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) secara resmi menciptakan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota (KaTa) kreatif Indonesia tahun 2022 pada akhir Januari (Panrb, 2022). Dikutip dari website resminya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Panrb), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa kebijakan program KaTa Kreatif memiliki *goals* untuk menggali potensi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan seni budaya dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi lokal. (Panrb, 2022). Pada Tahun 2021 lalu, sejumlah 21 kabupaten/kota ditetapkan oleh Menparekraf sebagai Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif pada program ini. Penetapan 21 Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia 2021 tersebut terbagi kepada dua tahapan dengan 10 Kabupaten/Kota pertama yang terdiri dari Balikpapan, Kabupaten Majalengka, Kota Surakarta, Kabupaten Rembang, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kota Palembang, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan kota Semarang. (Muzaqi & Tyasotyaningrum, 2022). Selanjutnya terdapat 11 kota/kabupaten lainnya yang terdiri dari Kota Ambon, Kabupaten Wakatobi, Kota Banda Aceh, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Karanganyar, Kota Salatiga, Sampai Kota Pekalongan (Zuhri et al., 2022).

Kabupaten Tulungagung yang notabene memiliki kekayaan sumber daya, tidak masuk kedalam daftar Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif pada program tersebut. Padahal menurut analisis pengelompokan potensi di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh (Sari & Abdullah, 2017) menunjukkan bahwa, wilayah kecamatan di Kabupaten Tulungagung terdiri dari : (1) Satu kecamatan dengan ciri rumah tangga perkebunan dan pertambangan tinggi; (2) Satu kecamatan dengan ciri rumah tangga perhutanan, perkebunan, perikanan, pendidikan, pertanian, dan industri tinggi; (3) Tujuh kecamatan dengan ciri rumah tangga perhutanan, perkebunan, Pendidikan, peternakan, dan pertambangan tinggi; (4) Sepuluh kecamatan dengan ciri rumah tangga perikanan, pendidikan, pertanian, dan industri yang tinggi (Monda & Fachruddin, 2018).

Jika semua orang ditanya jalan keluar dari kondisi potensi dan prestasi yang kontradiksi

di Tulungagung tersebut, maka akan sepakat, semua orang akan menunjuk individu kreatif yang dapat mengelola kota dan lingkungannya sebagai jalan keluarnya. Karena sekaya apapun sebuah kota dalam sumber dayanya, tanpa disertai dengan individu yang kreatif, maka potensi tersebut hanya akan tetap menjadi sebuah potensi. Meningkatkan individu yang kreatif dan inovatif dapat dimulai dari memperdayakan masyarakat. Seperti yang dikutip oleh (Chambers, 2012) bahwa kerangka konsep pemberdayaan adalah mengembangkan konsep-konsep pembangunan yang telah ada untuk melepaskan diri dari diksi "*zero-sum game* dan *trade off*" dengan titik tolak pandangan bahwa dengan adanya inovasi dan kreatifitas maka terciptalah pemerataan pembangunan.

Selain meningkatkan inovasi dan kreatifitas, pandangan tentang pemberdayaan juga harus memperhatikan aspek *socio cultural* budaya setempat. Menurut (Alsop & Heinsohn, 2012) menyebutkan bahwa *empowerment* dikonsepskan untuk membantu masyarakat melepaskan energi kreatif dan produktif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan perbaikan standar kehidupan secara terus-menerus demi mencapai ketahanan modal sosial suatu wilayah. Pandangan lain disampaikan oleh (Muslihatin et al., 2021) yang menyebutkan bahwa kapasitas lembaga sosial atau kelompok dapat memberi pilihan yang efektif yang kemudian ditransformasikan pilihan tersebut kedalam tindakan hasil yang diharapkan. Pembangunan yang berpusat pada kondisi sosial masyarakat atau *people centered development* dapat menuntun peran aktif masyarakat pada semua lapisan melalui konsep pembangunan partisipatif. Selain itu, kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan bagian dari kekayaan lokal yang berkaitan dengan cara pandang hidup (*way of life*) yang mengakomodasikan kebijakan berdasarkan tradisi yang berlaku pada suatu daerah sehingga kearifan lokal tidak hanya berupa norma dan nilai-nilai budaya saja melainkan juga inovasi gagasan termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan Kesehatan, pembangunan dan estetika (Prain et al., 2020).

Sementara itu, (Fabac, 2022) juga menambahkan bahwa pembangunan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan tatanan hidup yang lebih baik (komunitas, nasional, maupun global), yang berarti adalah berbagi kekuasaan (*power sharing*) serta menciptakan iklim politik yang sehat (*political creation*) untuk mengembangkan keseimbangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan power sharing, dengan cara memperbesar daya (*empowerment*) kepada pihak yang tidak/kurang berdaya dan mengurangi daya pihak yang terlalu berkuasa. Perubahan filosofi dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi juga harus diperhatikan. Pola pembangunan yang semula *top-down planning* menjadi *bottom-up planning*, *uninformity* menjadi variasi lokal, system komando kekuasaan menjadi proses

pembelajaran dan *improvement* menjadi *transformation*.

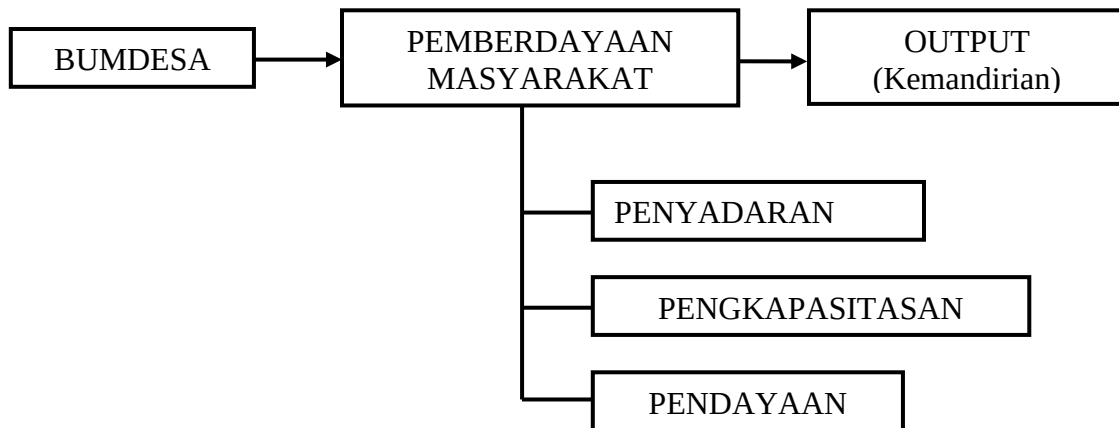
Dengan kata lain, Kabupaten Tulungagung harus menyediakan ruang khusus dan memfasilitasi masyarakat agar masyarakat terdorong melahirkan ide-ide kreatif dalam memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Kegiatan memfasilitasi dan melakukan dorongan kepada masyarakat ini erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Carlzon dan Macauley yang dikutip dari riset (Muzaqi & Hanum, 2020) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan pembebasan seseorang dari *control* dan kendali yang kaku, serta memberi kebebasan untuk tetap mempertanggungjawabkan gagasan dan keputusannya serta segala tindakannya. Sementara itu dalam memberdayakan kelompok masyarakat harus mempertimbangkan ruang khusus yang terdiri dari aspek ekonomi, politik, dan budaya (Mindarti et al., 2022)

Penyediaan ruang khusus dan fasilitas dalam pemberdayaan di Kabupaten Tulungagung tersebut sebenarnya secara khusus telah disanggupi melalui hadirnya BUMDesa di berbagai kecamatan di Kabupaten Tulungagung sejak beberapa tahun lalu. Salah satu diantara BUMDesa tersebut adalah BUMDesa Larasati. Meskipun terbilang belia, BUMDesa ini telah mengantongi berbagai gelar penghargaan, diantaranya: (1) Juara ke-16 dari 125 BUMDesa BRILLIANT se-Indonesia yang diselenggarakan Bank BRI tahun 2020; (2) Juara harapan 1 BUMDesa *ITS Award* kategori Digital Marketing Tahun 2020; (3) Anugerah Karya Mediatama dari PWI Tulungagung kategori Terbaik: Penggerak Ekonomi di Masa Covid-19 tahun 2020; dan (4) Juara 1 Lomba BUMDesa Tingkat Provinsi Tahun 2021.

BUMDesa yang memiliki motto "*Urip Iku Urup*" tersebut bergerak dalam sektor (1) Unit usaha kategori simpan pinjam; 2) unit usaha pertanian berupa Jeruk Purut yang menjanjikan di wilayah Desa Kendalbulur; 3) Unit usaha Minipadi Organik yang menyatukan model pertanian padi dengan membudidayakan air tawar dimana digunakan sebagai sarana penunjang unit desa wisata; (4) Unit usaha Wisata Desa "Nangkula Park" dengan fasilitas olahraga, taman bunga, kuliner dan wahana permainan anak-anak; (5) Pembayaran Online (PPOB) (BUMDesa Larasati, 2022).

Realitanya rata-rata BUMDesa di Tulungagung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih belum terlalu optimal. Hal ini disebabkan karena pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masing sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah

kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa sehingga konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan sturktur.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: (Hadiwijoyo, 2012)

Dari permasalahan yang dialami, maka pemberdayaan BUMdesa harus dilalui terlebih dahulu dari pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat menghasilkan *output* kemandirian desa. Sementara itu pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tulungagung akan dilihat dan dianalisis oleh 3 (tiga) unsur yaitu Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan. Oleh karena itu, peneliti akan menelusuri bentuk dan *output* pemberdayaan Desa melalui skema ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Larasati Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan judul riset “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Badan Usaha Milik Desa (Studi Riset di BUMDesa Larasati Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”.

2. Metode

Adapun riset ini menggunakan metode riset kualitatif. Metode kualitatif ditentukan karena peneliti ingin melihat fenomena kondisi yang lebih natural, yaitu menggambarkan tentang fenomena Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDesa Larasati Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Riset ini dilakukan untuk menggambarkan bentuk dan *output* pemberdayaan masyarakat berbasis konsep ekonomi BUMDesa Larasati Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu dan berpedoman pada pendapat Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (Hadiwijoyo, 2012) tentang tahapan pemberdayaan, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penyadaran,
- b. Pengkapasitasan,
- c. Pendayaan

Sumber data yang digunakan dalam riset ini yaitu semua aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa Larasati Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, yaitu Direktur, Manajer Unit Usaha Pembayaran *Online*, pengawas di BUMDesa Larasati dan Pemilik usaha UMKM dan Warung. Teknik *collecting* data dalam riset ini akan menerapkan beberapa tahapan dari (Gunawan, 2013) yaitu Observasi partisipan, *depth interview*, dan dokumentasi. Analisis data dalam riset ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut model ini, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yakni *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles et al., 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Memberdayakan masyarakat yaitu upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap serta kesadaran sumberdaya yang diambil dari penetapan kebijakan sampai kegiatan teknis dan pendampingan yang sesuai dengan esensi prioritas kebutuhan masyarakat (Puspitorini, 2017) (Rahayu & Kriswibowo, 2021). Sedangkan implementasi dari kebijakan pemberdayaan kunci utamanya adalah komunikasi. Komunikasi para pelaksana kebijakan sangat berperan dalam mengajak kelompok sasaran untuk menjalankan program pemberdayaan (Hariyoko, 2018) Pemberdayaan menurut Hadiwijoyo memiliki 3 (tiga) tahapan utama yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

1. Penyadaran

Penyadaran adalah langkah awal ketika melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Langkah ini merupakan tahapan awal dalam membentuk pemahaman dan pengartian kepada kelompok masyarakat bahwa masyarakat lokal memiliki hak untuk mencapai kesejahteraan. Pada langkah ini, masyarakat disadarkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk keluar dari masalah sosial sekitarnya. (Akbar et al., 2018). Pada langkah awal penyadaran ini masyarakat difasilitasi dalam bentuk sosialisasi oleh BUMDesa dan Aparatur Desa mengenai urgensi pemanfaatan potensi desa secara optimal. Langkah penyadaran masyarakat ini dilakukan dengan cara menggali potensi masyarakat, dan memberikan pemahaman serta memberikan motivasi. Selain itu, BUMDesa memberi pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan sumber daya yang ada (Kusbandrijo, 2020).

Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan

usaha melalui BUMDesa Larasati dimulai dengan proses penyadaran dan pembentukan perilaku masyarakat. Proses penyadaran yang dilakukan adalah dengan mengenali potensi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sejarah BUMDesa dan keuntungan bekerja sama dengan BUMDesa. Dimana unit-unit usaha BUMDesa memiliki program-program unggulan yang dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki usaha serupa namun sulit dalam berkembang. Unit-unit usaha yang didirikan BUMDesa ini disesuaikan dengan potensi yang ada di Desa Kendalbulur.

Hasil riset ini linier dengan riset (Bhinadi, 2017) yang menegaskan bahwa komunitas masyarakat menjadi subjek dalam pemberdayaan dengan cara diberikan penyadaran jika setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Selain itu faktor kepemimpinan juga sangat berpengaruh terhadap suksesnya program-program pemberdayaan (Suwardi et al., 2020). Tahap ini menunjukkan bahwa proses penyadaran tersebut datang dari dalam diri masyarakat yang menyadari potensi usaha apa saja yang mampu dibangun dan dikembangkan. BUMDesa Larasati menyadari bahwa banyak sekali potensi yang ada di Desa Kendalbulur yang dapat dikembangkan melalui unit-unit usaha pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, wisata dan minapadi. Setiap unit-unit ini memiliki produk-produk unggulan yang diperoleh dari kerja sama antar semua pelaku usaha yang memiliki usaha yang sama di bidang tersebut (Ufida et al., 2021).

Unit usaha simpan pinjam memiliki produk unggulan berupa meminjamkan modal untuk pengembangan usaha atau mendirikan usaha warga Desa Kendalbulur. Unit usaha pertanian memiliki produk unggulan dengan melakukan penanaman dan pengembangan jeruk Purut (*Citrus Histris*). Unit usaha mina padi memiliki produk unggulan yaitu budidaya ikan di sawah, karena dengan memelihara ikan di sawah dapat membantu pertumbuhan ikan dan dapat meminimalisir resiko hama yang akan menyerang tanaman padi. Jenis budidaya ikan yang berusaha dikembangkan adalah ikan patin. Unit usaha wisata memiliki produk unggulan wisata Nangkula Park yang memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha UMKM. Unit usaha kios online memiliki produk unggulan berupa pembayaran bank secara online atau *Payment Point Online Bank* yaitu suatu bisnis yang dipakai ketika membayar berbagai tagihan dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang ingin dibantu dalam memasarkan produk usaha mereka melalui kios online.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa adanya penyadaran yang dilakukan oleh BUMDesa dan pemerintah desa melalui sosialisasi sebagai wadah yang menampung aspirasi usaha mendapat respon yang antusias dari masyarakat setempat. Masyarakat yang memiliki usaha dan potensi untuk berkembang

diberikan kesempatan melalui penyadaran agar mampu melakukan perubahan melalui hasil usaha yang diperoleh. Masyarakat diberikan bekal ilmu untuk mengelola hasil usaha mereka dengan lebih kreatif dan inovatif sehingga hasil usaha yang dikembangkan tidak dijual dengan hasil atau bahan baku yang masih mentah saja. Hal ini akan menunjukkan bahwa masyarakat setempat dapat menambah penghasilan dengan mengelola sumber daya alam yang ada di Desa Kendalbulur. Dengan adanya tahap penyadaran ini, banyak respon positif dari masyarakat yang ingin berkembang dan memajukan usahanya.

2. Pengkapasitasan

Pengkapasitasan dapat diartikan sebagai upaya memampukan masyarakat. Masyarakat diharuskan mapan terlebih dahulu sebelum memberikan daya atau kuasa tertentu. Pengkapasitasan normalnya dilaksanakan dengan memberi pelatihan atau kemampuan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki *skill* dalam mengelola sesuatu nilai jual. Dalam hal ini masyarakat akan diajak untuk menggali sebuah potensi unggulan yang ada di wilayah tertentu serta diberikan pelatihan dalam mengelola hasil produk sehingga masyarakat tidak hanya asal dalam membuat olahan produk terbaru (Mashudi, 2013). Berbeda dengan komunitas masyarakat di kota yang memiliki keterbatasan dalam mengatur wilayahnya, dalam hal ini masyarakat di desa memiliki kapasitas mengatur wilayah seluruhnya (Bima Raka Asturimo Putra et al., 2019).

Tahap pengkapasitasan ini menunjukkan bahwa transformasi pengetahuan yang dilakukan melalui pelatihan yang bersifat teknis seperti pelatihan atau sosialisasi P-IRT, pelatihan ini ditujukan untuk membantu dan memberikan pembekalan P-IRT kepada masyarakat agar tidak hanya mampu memproduksi saja tetapi juga dapat mengurus sertifikasi perizinan untuk usahanya dimana perizinan ini bersifat skala rumahan. Selain itu, terdapat pelatihan olahan kulit ikan patin, karena banyak sekali masyarakat yang budidaya ikan patin, maka pelatihan ini ditujukan sebagai pembekalan dan pengembangan pengolahan produk dari ikan patin. Terdapat juga pelatihan Keuangan dari DPMD, STAN, Klinik BUMDesa Jatim yang ditujukan sebagai pembekalan untuk masyarakat supaya mampu mengelola dan manajemen sumber keuangan usaha.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu *goals* dari pemberdayaan masyarakat menurut (Mashudi, 2013) yang menyatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini menunjukkan bahwa tahap transformasi kemampuan juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk belajar dan mengembangkan diri sesuai kemampuan dan tuntutan dari kebutuhan. Kegiatan pelatihan ini berjalan baik dan mendapat respon yang aktif dari masyarakat pelaku usaha.

Masyarakat atau pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya juga diberikan kesempatan untuk bergabung dengan unit-unit yang didirikan BUMDesa. Unit-unit usaha BUMDesa turut ikut serta dalam mengembangkan, memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada, ikut serta dalam membangun, memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tiap unit serta ikut serta mengembangkan usaha yang sesuai dengan program unit masing-masing sehingga masyarakat juga akan terbantu dalam memasarkan produk hasil usaha.

3. Pendayaan

Tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat memiliki keterampilan yang dapat membentuk inisiatif dan inovatif untuk mewujudkan kemandirian. Dalam tahap ini terlihat dari seberapa jauh pencapaian masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai potensi dan bergabung dengan unit-unit yang ada di BUMDesa Larasati dengan harapan dapat meraih kualitas kehidupan yang semakin baik (Hadi, 2010). Disamping itu, masyarakat lebih diarahkan memfasilitasi proses pengambilan kebijakan yang saling terikat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kemampuan dan memberi peningkatan pendapatan, melaksanakan usaha yang memiliki skala industri serta menumbuhkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih partisipatif.

Hasil riset sejalan dengan (Prasetyo, 2016) yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat diberikan daya, otoritas, ataupun peluang terus berkembang dalam rangka mencapai kemandirian. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang mengetahui potensi desa, kemudian diberikan penyadaran hingga pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan potensi desa. Pada akhirnya masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dalam rangka mengembangkan produk unggulan di wilayahnya (Setiyani et al., 2023). BUMDesa Larasati juga telah membentuk unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi desa dan mendaftarkan unit usaha ini supaya mendapatkan legalitas berbadan hukum. Setiap unit desa memiliki kelompok yang telah difasilitasi sesuai dengan kebutuhan setiap unit. Hal ini, memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang bergabung dan bekerja sama dengan BUMDesa Larasati.

Selain adanya tahapan penyadaran dan pelatihan, kelompok masyarakat juga perlu diberikan pendampingan supaya mapu meningkatkan *skill* serta memberikan kemampuan dalam meningkatkan pendapatan. Masyarakat kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah dalam menciptakan usaha yang pada akhirnya melahirkan masyarakat yang putus ada serta tidak tertarik untuk meneruskan usaha yang dimilikinya. Jika terdapat permasalahan dimasyarakat maka BUMDesa akan lebih bermusyawarah memberikan solusi. Hasil riset ini sama dengan pendapat (Muzaqi & Hanum, 2020) bahwa apabila masyarakat telah mencapai

tahap ketiga yaitu tahap pendayaan dan peningkatan kemampuan, oleh karena masyarakat dapat secara mandiri menciptakan paradigma pembangunan dalam orientasi pemberdayaan. Dalam konsep pembangunan masyarakat seperti hal ini sering dianggap sebagai subjek atau pemeran utama dalam membangun dan menjadikan pemerintah sebagai fasilitator dalam masyarakat.

Pendampingan ini bertujuan supaya dapat menciptakan jenis usaha yang mampu dikelola sendiri oleh masyarakat sehingga dapat menghasilkan prodk unggulan yang berkualitas bagi kehidupan ekonomi sosial yang lebih baik sampai masyarakat tersebut mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah (Hariyoko, 2018). Hasil riset ini juga menunjukkan bahwa tahap peningkatan kemampuan dapat membentuk kemandirian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pelaku usaha sudah mampu berinovasi dengan usahanya, misalnya pada bidang perikanan yaitu budidaya ikan patin. Pelaku usaha yang memiliki budidaya ikan patin kini tidak hanya menjual ikan patin secara mentah saja, namun juga sudah mampu berinovasi dengan membuat olahan baru melalui bahan dasar ikan patin. Ikan patin ini memiliki banyak kandungan kalori dan protein serta memiliki kadar kolestrol yang rendah sehingga dinilai lebih aman bagi kesehatan. Produk olahan dari ikan patin dapat berupa produk olahan frozen yaitu nugget, otak-otak, pentol dari bahan dasar ikan dan lain-lain. Selain itu, usaha UMKM yang memanfaatkan limbah kayu kini telah diubah menjadi mainan miniatur truk. Bahan dasar limbah kayu ini selain harga terjangkau juga dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai jual. Pada bidang peternakan, pelaku usaha di Desa Kendalbulur juga memanfaatkan kambing etawa untuk diambil susu nya. Susu etawa ini selain menyehatkan juga banyak peminatnya.

Masyarakat juga mampu memanfaatkan wisata Nangkula Park sebagai tempat untuk memasarkan hasil produk mereka. Masyarakat mampu mengelola tempat wisata Nangkula Park menjadi tempat rekreasi dan tempat berbisnis. Selain itu, masyarakat juga sudah mampu memanfaatkan kios online sebagai tempat memasarkan usaha secara online dan sebagai tempat untuk pembayaran kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya respon aktif dan positif dari masyarakat pelaku usaha. Pemahaman masyarakat melalui potensi desa ditandai dengan kemampuan masyarakat yang mampu melakukan inovasi dengan mampu bekerjasama dan saling bergotong royong mengangkat perekonomian desa menjadi lebih baik.

4. Simpulan

Dari hasil riset yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya konsep pemberdayaan pada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Larasati Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan tahapan proses pemberdayaan.

1. Indikator tahapan yang digunakan oleh peneliti, yaitu tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (Hadiwijoyo, 2012):

- a. Tahap Penyadaran

Pada tahap penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa Larasati yaitu penyadaran yang datang dari diri masyarakat yang dilakukan melalui cara memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat. Dalam tahap ini masyarakat memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas diri yang dapat diperoleh dengan cara berperan dalam mengembangkan potensi wilayah yang dimiliki di masing-masing usaha masyarakat.

- b. Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap pengkapasitasan, kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa Larasati yaitu dilakukan dengan memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan tema produk unggulan yang ada pada unit-unit BUMDesa. Berbagai pelatihan tersebut dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk belajar dan menambah wawasan untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan dan tuntutan kebutuhannya.

- c. Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa Larasati yaitu bahwa beberapa pelaku usaha baik usaha individu dan kelompok berhasil membentuk sebuah kemandirian. Dimana factor kemandirian ditandai oleh mempunyai masyarakat dalam melakukan berbagai macam inisiatif dan inovasi dalam mengembangkan produk unggulan di Desa Kendalbulur. Selain itu, masyarakat juga mampu melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap usaha yang dikembangkan sehingga seluruh usaha dapat dilakukan secara optimal.

2. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat adalah kondisi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan budaya gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang cukup erat. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam unit-unit BUMDesa Larasati yang masih kurang karena sumber daya manusia yang belum memadai.

Dari hasil riset yang sudah dikerjakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Melalui Desa (BUMDesa) Larasati Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, maka peneliti juga memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan pemberdayaan yang dilakukan BUMDes Larasati mampu menyadarkan masyarakat untuk memiliki inisiatif berinovasi dan berkembang dalam meningkatkan

perekonomian melalui produk-produk unggulan.

- b. Diharapkan BUMDes Larasati dan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dan bergotong royong untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa Kendalbulur dengan memberikan fasilitas yang mendukung untuk masyarakat pelaku usaha.

5. Referensi

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Alsop, R., & Heinsohn, N. (2012). *Measuring empowerment in practice: Structuring analysis and framing indicators* (Vol. 3510). World Bank Publications.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Chambers, R. (2012). *Revolutions in development inquiry*. Routledge.
- Fabac, R. (2022). Digital Balanced Scorecard System as a Supporting Strategy for Digital Transformation. *Sustainability*, 14(15), 9690.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143.
- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Graha Ilmu.
- Hariyoko, Y. (2018). Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 1011–1015. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1286>
- Kusbandrijo, B. (2020). Pelaksanaan Paten Di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(2).
- Mashudi, M. (2013). PENGUATAN PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN DI KAWASAN WISATA KULINER PANTAI PUNGKRUK MOROREJO MLONGGO JEPARA DALAM PENCEGAHAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 13(2), 269–290.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Mindarti, L. I., Galih, A. P., & Widhiyanti, H. N. (2022). EMPOWERING FORMER FEMALE MIGRANT WORKERS TOWARDS PRODUCTIVE ENTREPRENEURSHIP BASED ON SELF-GOVERNANCE. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(1).
- Monda, I. G., & Fachruddin, I. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tulungagung. *Mediasosian*, Vol. 2(2), hal. 1-9.
- Muslihatin, W., Purwani, K. I., Ermavitalini, D., Prasetyo, E. N., Nurhatika, S., Nurhidayati, T., Jadid, N., Febrianti, A., Yunas, N. S., & Raikhani, A. (2021). Community empowerment of

Sumberpelas, Plabuan Village-Jombang to create independent and sustainable Moringa oleifera village. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 649(1), 12034.

- Muzaqi, A. H., & Hanum, F. (2020). Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 673–691.
- Muzaqi, A. H., & Tyasotyaningrum, B. (2022). Village Community Empowerment Model in Smart Village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), 42–53.
- Prain, G., Wheatley, C., Odsey, C., Verzola, L., Bertuso, A., Roa, J., & Naziri, D. (2020). development partnerships for scaling complex innovation: Lessons from the Farmer Business School in IFAD-supported loan-grant collaborations in Asia. *Agricultural Systems*, 182, 102834.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86–100.
- Puspitorini, S. (2017). Implementasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) Tahun 2014 di Kabupaten Trenggalek. *Mediasosian*, Vol. 1(2), hal. 54-61.
- Putra, B. R. A., Syafi'i, A., & Kendry, M. (2019). Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Siwalankerto. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(1), 1124–1130.
- Rahayu, O. Y., & Kriwibowo, A. (2021). Social Enablement On Economic Recovery Process Of Sme's Sector At New Normal Era In Kediri City. *JPAP*, 7(1), 48.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34–49.
- Setiyani, Asri, Endang Indartuti, and Yusuf Hariyoko. 2023. "PRINSIP GOOD GOVERNANCE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SEDATI AGUNG KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3(2):108–16.
- Suwardi, S., Sugiyarti, S. R., & Novaria, R. (2020). Kepemimpinan Kota Surakarta 2020–2025 Identifikasi Karakteristik Calon Wali Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(2).
- Ufida, Nur, Adi Soesiantoro, and Yusuf Hariyoko. 2021. "PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi Kasus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1(3):1–23.
- Zuhri, A. D. A., Alim, A. H., & Sahal, A. El. (2022). *Pemberdayaan UMKM Pada Sektor Pemasaran Melalui Kampung Festival di Kelurahan Pegirian*. 1, 87–98.